



## **Implementasi Website Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam Peningkatan Layanan Pendataan Keluarga pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN**

Syamsir<sup>1\*</sup>, Nanda Alya Pratiwi<sup>2</sup>, Naila Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Master of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Padang  
Email: [syamsir@fis.unp.ac.id](mailto:syamsir@fis.unp.ac.id) (Corresponding Author)

<sup>2,3</sup> Public Administration Department, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Padang

### **Abstract**

To improve the quality of family data services, BKKBN has carried out service system reform through the use of information technology. This reform is implemented by developing and applying SIGA as an integrated information system. SIGA serves as a tool for data collection, work mapping, program intervention, and performance measurement across all administrative levels. This study aimed to investigate the implementation of the SIGA website program in an effort to improve the quality of family data collection services at the National Population and Family Planning Board (BKKBN) office, in line with service system reform through the use of information technology. This study reflected fieldwork experiences using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through several competent informants at the Ministry of Population and Family Development/BKKBN. Data were analyzed using interactive modeling. The results indicated that through data digitalization, SIGA enables services to become more accurate, efficient, and accessible. However, its implementation still faces technical and human resource readiness challenges. Overall, SIGA is a key element in BKKBN's service reform efforts, supporting a modern, responsive, and sustainable family data governance system.

**Keywords:** Service reform, BKKBN, information system, governance system, family data.

*Received December 8, 2025*

*Revised December 30, 2025*

*Published December 31, 2025*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

### **Pendahuluan**

Transformasi digital di sektor pemerintahan terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan data keluarga yang menjadi dasar perencanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan keluarga memerlukan sistem pendataan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Keberadaan data keluarga yang berkualitas sangat penting karena menjadi dasar penentuan sasaran, perencanaan intervensi, pengukuran kinerja, serta evaluasi program di seluruh tingkatan wilayah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BKKBN mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481/PER/G4/2016. Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah suatu tatanan yang terdiri atas data, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi keluarga yang tepat dan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui digitalisasi ini, SIGA hadir sebagai inovasi yang memperkuat proses pendataan keluarga secara nasional melalui platform web dan aplikasi mobile.

Implementasi SIGA memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data keluarga dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terstandar. Data keluarga yang sebelumnya dikumpulkan secara manual kini dapat diproses secara komputerisasi, baik secara offline maupun online, menyesuaikan kondisi infrastruktur teknologi di setiap daerah. Hal ini mendorong modernisasi layanan pendataan keluarga di berbagai wilayah. Berdasarkan observasi selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kemendukbangga/BKKBN pada 11 November 2025, pemanfaatan data keluarga dalam monitoring dan pelaporan menunjukkan bahwa SIGA telah digunakan sebagai instrumen utama dalam pelayanan pendataan keluarga, meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh narasumber.

Melihat pentingnya peran SIGA dalam menyediakan data keluarga yang berkualitas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi SIGA, dampaknya terhadap penyelenggaraan layanan pendataan keluarga, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukung keberhasilannya. Pemahaman tersebut diperlukan agar SIGA dapat terus dikembangkan sebagai fondasi digital dalam memperkuat akurasi dan efektivitas pendataan keluarga di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi dan menjawab beberapa pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana penerapan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam upaya peningkatan layanan pendataan keluarga pada Kemendukbangga/BKKBN?; 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SIGA?; 3) Bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi kendala implementasi SIGA? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam layanan pendataan keluarga pada Kemendukbangga/BKKBN melalui website; mengidentifikasi serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi SIGA; dan merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan SIGA guna meningkatkan kualitas layanan pendataan keluarga.

## **Tinjauan Kepustakaan**

### ***Konsep Reformasi***

Reformasi pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan mendasar yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih optimal dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) mendefinisikan reformasi proses transformasi menyeluruh untuk perbaikan dalam bidang sosial, budaya, politik, maupun agama. Meutia (2017) menegaskan bahwa reformasi merupakan peralihan dari kehidupan sebelumnya menuju kehidupan baru yang lebih baik dengan tujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedarmayanti dalam Permana (2019) juga menjelaskan bahwa reformasi adalah suatu proses yang sistematis, terpadu, dan komprehensif yang diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

Pandangan ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya berfokus pada perubahan struktural, tetapi juga mencakup pembenahan sistem, budaya kerja, serta mekanisme pelayanan publik agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, reformasi dapat dipahami sebagai upaya penting dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk reformasi pelayanan publik.

### ***Konsep Pelayanan Publik***

Pelayanan merupakan bagian yang melekat dengan kehidupan manusia, karena pada hakikatnya setiap orang selalu membutuhkan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah pelayanan berasal dari kata “layan”, yang artinya menolong atau menyediakan apa yang dibutuhkan orang lain. Menurut Moenir dalam Marwiyah (2023), pelayanan pada hakikatnya adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui tindakan atau bantuan langsung dari pihak lain. Sifat pelayanan bersifat abstrak atau intangible, karena tidak berwujud secara fisik tetapi dapat dirasakan efeknya oleh pengguna layanan. Moenir dalam Marwiyah (2023) juga menambahkan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memberikan tingkat kepuasan tertentu kepada pihak yang dilayani, berdasarkan kemampuan dari penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Dalam konteks pelayanan publik, pelayanan memiliki makna sebagai cara melayani, usaha memenuhi kebutuhan orang lain, serta kemudahan yang diberikan dalam proses jual beli barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik mendefinisikannya sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Menurut Hardiansyah (2011), mengutip *American Marketing Association*, pelayanan adalah aktivitas yang tidak berwujud (*intangible*), berlangsung sesaat, dan dialami langsung oleh penerima layanan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses penyediaan layanan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kualitas.

### ***SIGA (Sistem Informasi Keluarga)***

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan sistem informasi resmi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481/PER/G4/2016, Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah suatu sistem yang menyatukan berbagai elemen seperti data, indikator, prosedur, sarana, teknologi, dan tenaga pelaksana. Semua komponen tersebut diorganisasikan secara menyeluruh agar mampu menghasilkan informasi keluarga yang valid dan siap dipakai untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Definisi ini menegaskan bahwa SIGA bukan sekadar aplikasi, tetapi merupakan sistem menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai komponen pendukung dalam proses pengelolaan data keluarga secara nasional.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN turut mendorong percepatan transformasi digital di bidang pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan inovasi teknologi, salah satunya melalui aplikasi SIGA. Aplikasi ini merupakan bentuk implementasi e-government yang berfungsi memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data keluarga secara digital melalui platform web maupun aplikasi mobile. Tujuan utama pengembangan SIGA adalah meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (Badani et al. 2025) Dengan digitalisasi ini, proses pendataan keluarga yang sebelumnya manual dapat dilakukan lebih praktis dan akurat sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Peran SIGA sangat strategis bagi pelaksanaan Program Bangga Kencana yang mengandalkan kualitas data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan manajerial. Badani (2025) menekankan bahwa SIGA berkontribusi signifikan dalam memperkuat manajemen program melalui penyediaan data yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Untuk memperkuat sistem data yang lebih komprehensif, BKKBN turut menyelaraskan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dengan sistem informasi kependudukan, sehingga SIGA dapat dimanfaatkan sebagai acuan kerja, sarana untuk melakukan intervensi program, serta alat pemantau kinerja pada setiap level wilayah. Nurhidayah (2022) menyebutkan bahwa SIGA merupakan fasilitas yang sangat krusial bagi BKKBN karena informasi keluarga yang dihasilkannya digunakan untuk memantau pelaksanaan program, menjadi landasan penyusunan perencanaan, serta menjadi bahan evaluasi pada seluruh tingkat wilayah dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, SIGA dapat dipahami sebagai instrumen digital yang esensial dalam modernisasi pelayanan kependudukan, yang tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan akurasi data, kualitas perencanaan, serta efektivitas program pembinaan keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

### ***Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan penting bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, karena dapat memperluas dan memperkuat landasan teori yang digunakan. Dari hasil telaah terhadap beberapa jurnal, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama,

namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan fokus penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan:

- 1) Penelitian tentang “Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi” oleh Nurma Apriliani, Didah Rabi’atul A’dawiyah, Abdul Manan, dan Fida Farida. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan SIGA serta pelatihan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas layanan DP2KBP3A baik secara parsial maupun simultan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel SIGA sebagai instrumen pelayanan digital, namun berbeda pada objek penelitian yang dalam penelitian ini berfokus pada BKKBN.
- 2) Penelitian tentang “Pengaruh Implementasi SIGA dan Kompetensi Digital Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat” oleh M. Iqbal Badani, Ramli S, Muhammad Aqil, dan Nur Wahyunianti Dahri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIGA dan kompetensi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai, dengan kompetensi digital sebagai faktor paling dominan. Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan SIGA dalam mendukung kinerja birokrasi, sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah fokus pada reformasi sistem pelayanan di BKKBN secara lebih luas, bukan hanya efektivitas kerja pegawai.
- 3) Penelitian tentang “Sistem Informasi Data Keluarga (Siga) Berbasis Website Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara” oleh Nurhidayah . Penelitian ini menyoroti bahwa SIGA menyebutkan bahwa SIGA merupakan fasilitas yang sangat krusial bagi BKKBN karena informasi keluarga yang dihasilkannya digunakan untuk memantau pelaksanaan program, menjadi landasan penyusunan perencanaan, serta menjadi bahan evaluasi pada seluruh tingkat wilayah dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) pada Kemendukbangga/BKKBN. Objek penelitian yang dikaji adalah SIGA sebagai sistem pendukung layanan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 2025 di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN. Pada kegiatan tersebut, peneliti memperoleh informasi terkait pelaksanaan program-program kependudukan, proses kerja instansi, serta gambaran umum pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas BKKBN. Data yang diperoleh dari kegiatan KKL kemudian dilengkapi melalui dokumentasi berupa foto kegiatan, materi yang dibagikan, serta arsip informasi publik yang relevan. Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi BKKBN, dan penelitian terdahulu mengenai sistem informasi keluarga, digitalisasi layanan publik, dan implementasi teknologi pemerintahan.

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif sesuai model analisis Miles dan Huberman. Model ini meliputi proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2023), analisis data dilakukan secara interaktif melalui empat tahapan utama. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan temuan lapangan yang bersifat deskriptif maupun reflektif. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disederhanakan melalui proses kondensasi agar fokus pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif atau visual untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan informasi. Tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna, pola, dan temuan penelitian secara bertahap hingga diperoleh

kesimpulan yang utuh dan tervalidasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi SIGA, kendala yang muncul, dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan pada Kemendukbangga/BKKBN.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN***

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) adalah instansi pemerintah yang memiliki mandat untuk mengelola urusan terkait kependudukan serta pembangunan keluarga di Indonesia. Lembaga ini merupakan hasil perubahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang kemudian beralih status menjadi kementerian setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024. Perubahan status ini menegaskan komitmen negara dalam memperkuat tata kelola kependudukan serta pembangunan keluarga sebagai pondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Secara historis, pelaksanaan program kependudukan di Indonesia berawal dari berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957 sebagai pionir layanan keluarga berencana. Perhatian pemerintah terhadap isu kependudukan meningkat pada era Orde Baru melalui Instruksi Presiden tahun 1968 yang membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), yang kemudian berkembang menjadi BKKBN pada tahun 1970. Setelah era reformasi dan diterapkannya desentralisasi, perluasan mandat bagi BKKBN ditetapkan melalui UU No. 52 Tahun 2009. Perkembangan ini kemudian mengarah pada perubahan status lembaga tersebut menjadi kementerian pada tahun 2024. Momen bersejarah terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. resmi dilantik sebagai Menteri pertama, yang sekaligus mempertegas arah kebijakan kependudukan nasional.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Kemendukbangga berpedoman pada visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diimplementasikan melalui delapan misi pembangunan nasional atau Asta Cita. Misi tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, peningkatan pertahanan dan kemandirian bangsa, pengembangan SDM, reformasi politik dan birokrasi, serta pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan berbasis desa. Visi dan misi ini menjadi dasar strategis dalam setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan kementerian.

Struktur organisasi Kemendukbangga terdiri dari pejabat inti yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga. Struktur pimpinan Kemendukbangga terdiri dari beberapa pejabat utama. Posisi Menteri/Kepala dijabat oleh Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., sedangkan peran Wakil Menteri diemban oleh Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Fungsi Sekretaris Kementerian dipercayakan kepada Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., dan pengawasan internal berada di bawah Inspektur Utama, yaitu Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE. Susunan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan optimal.

Kemendukbangga memiliki tugas strategis sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga serta melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kementerian menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain perumusan dan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan administrasi, pengelolaan aset negara, termasuk pula menjalankan berbagai fungsi tambahan yang ditugaskan langsung oleh Presiden.

### ***Implementasi SIGA***

Implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) pada Kemendukbangga/BKKBN merupakan langkah strategis dalam mendukung modernisasi layanan pendataan keluarga di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481/PER/G4/2016, SIGA dipahami sebagai suatu sistem yang menyatukan berbagai komponen mulai dari data, informasi, indikator, alur

kerja, perangkat, teknologi, hingga tenaga pelaksanaannya yang dikelola dan dijalankan secara terkoordinasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam pembangunan keluarga. Dengan pemaknaan tersebut, SIGA menjadi instrumen utama yang digunakan BKKBN dalam mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data keluarga secara nasional.

Dalam praktiknya, penerapan SIGA meliputi rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun, mengolah, menyajikan, menyimpan, hingga memanfaatkan data keluarga. Data dikumpulkan melalui kegiatan pendataan keluarga dan pencatatan layanan KB, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem melalui mekanisme manual, komputerisasi offline, maupun komputerisasi online, menyesuaikan kondisi infrastruktur teknologi di lapangan seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan ketersediaan listrik. Setelah terkumpul, data keluarga diproses melalui validasi, pengkodean, dan pengecekan konsistensi sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan siap digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi Program Bangsa Kencana.

Implementasi SIGA juga mengharuskan adanya penjaminan keamanan dan kerahasiaan data keluarga yang bersifat tertutup. Karena itu, sistem dilengkapi pengaturan hak akses seperti administrator, operator, dan supervisor yang berfungsi untuk menjaga integritas data BKKBN juga menyiapkan tenaga pengelola SIGA di setiap tingkat wilayah, yang dibekali pelatihan terkait pengelolaan data keluarga dan pemanfaatan teknologi informasi.

SIGA mendukung penyediaan data yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, sehingga memudahkan BKKBN dalam perencanaan program, identifikasi sasaran, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan keluarga. Dengan demikian, implementasi SIGA dapat dikatakan menjadi fondasi digital dalam peningkatan kualitas layanan pendataan keluarga di Kemendukbangga/BKKBN.

#### ***Dampak SIGA terhadap Layanan Pendataan Keluarga***

Penerapan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kependudukan, terutama dalam hal pendataan keluarga, penyajian informasi, dan akurasi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan berbagai temuan penelitian, SIGA membawa dampak pada beberapa aspek berikut.

##### *a. Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Pendataan*

SIGA memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan data keluarga dilakukan secara digital sehingga mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual. Data dari penelitian Nurhidayah (2022) menunjukkan bahwa SIGA mempercepat alur pelaporan mulai dari tingkat lini lapangan hingga kabupaten/kota karena sistem sudah terintegrasi dan real time.

##### *b. Efektivitas Layanan Publik Meningkat*

Hasil penelitian Apriliani (2024) menyatakan bahwa penggunaan SIGA oleh para pegawai berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap efektivitas layanan di dinas yang menangani KB dan kependudukan. Pemanfaatan fitur SIGA seperti pencatatan pelayanan KB, monitoring faskes, dan pelaporan cakupan program membuat layanan lebih tertib, cepat, dan mudah dipantau.

##### *c. Memperkuat Perencanaan Program Bangsa Kencana*

SIGA berperan sebagai “kendaraan penting” untuk menyediakan data dasar bagi pengambilan keputusan dan penyusunan intervensi program (Nurhidayah 2022). Data keluarga yang tersaji membantu BKKBN menargetkan sasaran prioritas, misalnya stunting, keluarga risiko tinggi, maupun pelayanan KB yang belum merata.

##### *d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*

SIGA mendukung prinsip e-government karena informasi pelayanan, laporan faskes, serta pergerakan data keluarga dapat diakses oleh berbagai tingkatan wilayah. Hal ini memperkuat sistem pengawasan internal dan mencegah manipulasi data.

e. *Kemudahan Koordinasi Antar-Level Pemerintahan*

Sinkronisasi data antara BDKI, faskes, dan OPD KB membuat koordinasi lebih cepat. Proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

***Kendala Implementasi SIGA***

Meski memberikan berbagai manfaat, implementasi SIGA masih menghadapi beberapa hambatan yang umumnya ditemukan di berbagai daerah dan juga dijelaskan dalam dokumen penelitian.

a. *Keterbatasan Kompetensi Digital SDM*

Beberapa petugas dan kader lapangan belum terbiasa mengoperasikan perangkat digital atau aplikasi berbasis web. Penelitian Apriliani (2024) menunjukkan bahwa tanpa pelatihan, pegawai cenderung lambat dan kurang optimal memanfaatkan SIGA.

b. *Kualitas Jaringan dan Infrastruktur Teknologi yang Belum Sepenuhnya Merata*

Di banyak wilayah, terutama di desa atau daerah terpencil, akses internet masih terbatas dan membuat proses input data menjadi terganggu. Kendala ini juga disebutkan sebagai hambatan utama dalam laporan-laporan SIGA tingkat daerah.

c. *Tidak Konsistennya Pelaporan oleh Fasilitas Kesehatan*

Beberapa faskes pemerintah maupun swasta belum disiplin mengirimkan laporan pelayanan KB ke SIGA secara rutin. Hal ini menyebabkan data yang masuk sering tidak lengkap atau terlambat.

d. *Beban Kerja Petugas Lapangan*

PLKB/PKB sebagai ujung tombak pelaporan memiliki tugas ganda yang cukup berat melakukan pendataan, memberikan penyuluhan, sekaligus melakukan entri data. Hal ini dapat memperlambat proses implementasi SIGA.

e. *Kendala Teknis pada Aplikasi*

Sejumlah penelitian melaporkan masih ditemukannya error sistem, aplikasi yang tiba-tiba berhenti, dan pembaruan yang tidak stabil sehingga menghambat proses input data.

***Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi SIGA***

Keberhasilan implementasi SIGA dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berhubungan. Agar implementasi SIGA berjalan optimal, beberapa faktor pendukung menjadi kunci keberhasilan, di antaranya:

a. *Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah*

Komitmen organisasi dalam menerapkan digitalisasi pendataan keluarga merupakan faktor paling penting. Adanya landasan hukum seperti PP No. 87/2014 dan regulasi internal BKKBN memperkuat posisi SIGA sebagai sistem resmi sehingga penggunaannya wajib dan terarah.

b. *Ketersediaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM*

Menurut Apriliani (2024), pelatihan yang memadai menjadi faktor paling berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas layanan berbasis SIGA. Pegawai yang dilatih akan lebih siap mengoperasikan sistem dan meminimalkan kesalahan input.

c. *Komitmen Organisasi dan Manajemen*

Dukungan pimpinan BKKBN, OPD KB, hingga pengelola data sangat menentukan konsistensi pelaporan. Komitmen ini termasuk dalam bentuk supervisi, monitoring, serta penguatan tugas pelaporan.

d. *Infrastruktur Teknologi yang Mendukung*

Ketersediaan perangkat seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet stabil merupakan syarat utama untuk keberhasilan implementasi. Beberapa daerah yang sudah meningkatkan infrastruktur terbukti menunjukkan pelaporan SIGA yang lebih lancar.

e. *Kolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan dan Mitra Program*

Kemitraan yang baik dengan faskes, bidan praktik mandiri, serta mitra KB membantu memastikan bahwa data pelayanan KB dapat tersaji lengkap dalam SIGA.

f. *Dukungan Literasi Teknologi Masyarakat dan Kader*

Di daerah yang kadernya aktif dan melek teknologi, pengumpulan serta pelaporan data keluarga berjalan lebih cepat dan akurat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi sistem pelayanan di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui penerapan program Sistem Informasi Keluarga (SIGA) merupakan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang kependudukan. Implementasi SIGA tidak hanya menghadirkan inovasi dalam pendataan keluarga, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja aparatur melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Melalui SIGA, proses perencanaan, intervensi program, hingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan terstandar, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Pemanfaatan program SIGA memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi data, serta kemudahan akses informasi pada berbagai tingkat wilayah. Hal ini menjadikan SIGA sebagai instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus memperkuat arah pembangunan keluarga yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, implementasi reformasi pelayanan melalui SIGA masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital yang belum merata di seluruh daerah.

Dengan demikian, optimalisasi penerapan program SIGA memerlukan dukungan berkelanjutan berupa peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem informasi yang adaptif, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Apabila tantangan tersebut dapat diatasi, reformasi sistem pelayanan di BKKBN melalui SIGA berpotensi menjadi model transformasi digital yang mampu meningkatkan kualitas layanan kependudukan secara nasional.

## Referensi

- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga. (2017). Jakarta: BKKBN.
- Apriliani, Nurma, Didah Rabi'atul A'dawiyah, Abdul Manan, and Fida Farida. (2024). "Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi." *Journal Of Social Science Research* 4(2): 7175–85.
- Badani, M Iqbal, S Ramli, Muhammad Aqil, and Nur Wahyunianti Dahri. 2025. "Pengaruh Implementasi SIGA Dan Kompetensi Digital Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai

- 
- Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.” *Journal Of Management Branding* 2(2): 194–206.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marwiyah, Siti. (2023). "Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi". Probolinggo.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nurhidayah. (2022). “Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA) Berbasis Website Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIRSI)*: 40–50.
- Permana, Briyam Ksatria. (2019). “Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal MSDA* 7(1): 41–62.
- Saleh, Sirajuddin. 2023. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: AGMA.